

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DUMAI

2021

Kependudukan **Ketenagakerjaan**
Kesehatan & Gizi **Taraf & Pola Konsumsi**
Pendidikan **Perumahan & Lingkungan**



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DUMAI**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DUMAI

2021

Kependudukan
Kesehatan & Gizi
Pendidikan

Ketenagakerjaan
Taraf & Pola Konsumsi
Perumahan & Lingkungan



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA DUMAI 2021

ISBN : -
Nomor Publikasi : 14730.2113
Katalog BPS : 4102004.1473

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah halaman : xiv + 60 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kota Dumai
Ilustrasi diambil dari Freepik

Diterbitkan Oleh :
© Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Dicetak Oleh :
Badan Pusat Statistik Kota Dumai

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

**INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA DUMAI 2021**

Penanggung Jawab Umum :
Drs. Morhan Tambunan, M.Si.

Penanggung Jawab Teknis :
Reni Farida, S.Si.

Penyunting :
Reni Farida, S.Si.

Penulis :
Aghnan Yarits Anggara, S.Tr.Stat.

Pengolah Data :
Aghnan Yarits Anggara, S.Tr.Stat.

Gambar Kulit, Desain, dan Tata Letak :
Aghnan Yarits Anggara, S.Tr.Stat.


KATA PENGANTAR

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai 2021 merupakan publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Dumai yang menyajikan tingkat perkembangan kesejahteraan rakyat di Kota Dumai antarwaktu. Data yang digunakan adalah data BPS yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan Proyeksi Penduduk Kota Dumai 2015-2025.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut enam bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, serta Perumahan dan Lingkungan yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kami memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Akhirnya, kami mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan publikasi serupa di masa mendatang.

Dumai, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Dumai



Drs. Morhan Tambunan, M.Si.



DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SINGKATAN DAN AKRONIM.....	xiii
BAB I Kependudukan.....	3
BAB II Kesehatan dan Gizi.....	17
BAB III Pendidikan.....	25
BAB IV Ketenagakerjaan.....	37
BAB V Taraf dan Pola Konsumsi.....	45
BAB VI Perumahan dan Lingkungan.....	51
ISTILAH TEKNIS.....	59

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk (jiwa), Laju Pertumbuhan Penduduk (%), dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2017-2021	4
Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk (jiwa per km ²) Kota Dumai menurut Kecamatan Tahun 2019-2020	6
Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan (%) di Kota Dumai Tahun 2019-2020	8
Tabel 1.4 Persentase (%) Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2019-2020	10
Tabel 1.5 Persentase (%) Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Digunakan di Kota Dumai Tahun 2019-2020	12
Tabel 2.1 Persentase (%) Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020	18
Tabel 2.2 Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kota Dumai Tahun 2020	19
Tabel 2.3 Persentase (%) Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Dumai Tahun 2019-2020	21
Tabel 3.1 Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Dumai Tahun 2020	27
Tabel 3.2 Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Dumai Tahun 2019-2020	30



halaman

Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2019-2020	32
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2019-2020	33
Tabel 4.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Dumai Tahun 2019-2021	38
Tabel 4.2	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2019-2021	40
Tabel 4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2019-2021	41
Tabel 5.1	Nilai (rupiah) dan Persentase (%) Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai Tahun 2020-2021	46
Tabel 5.2	Distribusi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai Tahun 2020-2021	47
Tabel 6.1	Persentase (%) Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Dumai Tahun 2019-2020	53
Tabel 6.2	Persentase (%) Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah di Kota Dumai Tahun 2019-2020	54
Tabel 6.3	Persentase (%) Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Dumai Tahun 2019-2020	55
Tabel 6.4	Persentase (%) Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Dumai Tahun 2019-2020	57

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2017-2021	5
Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan (%) Kota Dumai Tahun 2016-2020	7
Gambar 1.3 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2019-2020	9
Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2019-2020	18
Gambar 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15+ Tahun menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Dumai Tahun 2019-2020	26
Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kota Dumai Tahun 2015-2020	29
Gambar 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp 000) menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2020-2021	46

SINGKATAN DAN AKRONIM

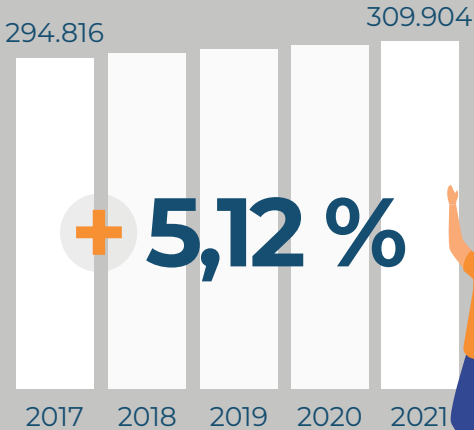
AKDR	Alat Kontrasepsi Dalam Rahim	S1	Strata 1
AMH	Angka Melek Huruf	S2	Strata 2
APM	Angka Partisipasi Murni	S3	Strata 3
APS	Angka Partisipasi Sekolah	Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
BAB	Buang Air Besar	SD	Sekolah Dasar
BKKBN	Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional	SMA	Sekolah Menengah Atas
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
BPS	Badan Pusat Statistik	SMP	Sekolah Menengah Pertama
DIV	Diploma Empat	STTB	Surat Tanda Tamat Belajar
IPAL	Instalasi Pengolahan Air Limbah	Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
IPM	Indeks Pembangunan Manusia	TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
IUD	<i>Intrauterine Device</i>	TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
Jamkesda	Jaminan Kesehatan Daerah	UKBM	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
JKN	Jaminan Kesehatan Nasional	UU	Undang-undang
KB	Keluarga Berencana	UUD	Undang-undang Dasar
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	WHO	<i>World Health Organization</i>
Kepmen	Keputusan Menteri		
km ²	kilometer persegi		
m ²	meter persegi		
MA	Madrasah Aliyah		
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan		
MI	Madrasah Ibtidaiyah		
MKJP	Metode Kontrasepsi Jangka Panjang		
MOP	Medis Operasi Pria		
MOW	Medis Operasi Wanita		
MTs	Madrasah Tsanawiyah		
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini		
PBI	Penerima Bantuan Iuran		
PLN	Perusahaan Listrik Negara		
Polindes	Pondok Bersalin Desa		
Poskesdes	Pos Kesehatan Desa		
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu		
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat		
Pustu	Puskesmas Pembantu		
RLS	Rata-rata Lama Sekolah		
RS	Rumah Sakit		

KEPENDUDUKAN

KOTA DUMAI



Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2017-2021

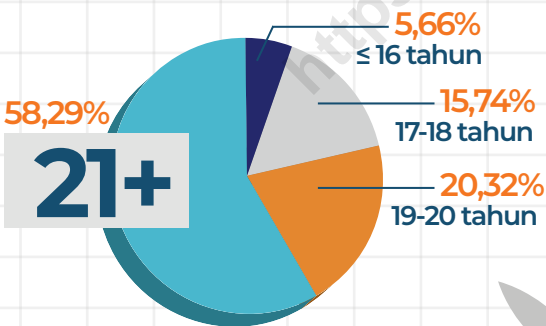


Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2021

104,38

Dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat 104 penduduk laki-laki.

Persentase Wanita 10 Tahun ke Atas Pernah Kawin menurut Usia Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2020



Angka Beban Ketergantungan (Dependency Ratio) di Kota Dumai Tahun 2021

47,22%

Setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 47 penduduk usia tidak produktif.



BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA DUMAI



BAB I

Kependudukan

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya adalah terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk, harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

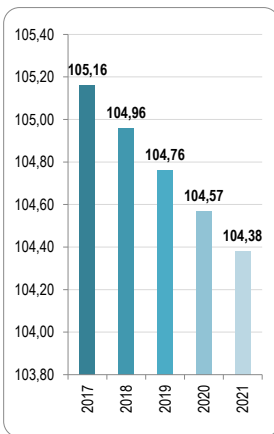
Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk serta Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi di Indonesia dan terus menjadi perhatian pemerintah yaitu jumlah penduduk Indonesia, termasuk di Kota Dumai. Saat ini, jumlah penduduk di Kota Dumai pada tahun 2021 berdasarkan penghitungan Proyeksi Penduduk 2015—2025 tercatat sebanyak 309.904 jiwa. Jumlah penduduk tersebut mengalami kenaikan sekitar 3.582 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 yang mencapai 306.322 jiwa. Bila dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017, jumlah penduduk di Kota Dumai hingga tahun 2021 mengalami peningkatan sekitar 5,12 persen. Dengan kata lain, selama kurun waktu empat tahun terakhir jumlah penduduk Kota Dumai telah mengalami penambahan penduduk sebesar 15.088 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk (jiwa), Laju Pertumbuhan Penduduk (%), dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	294.816	1,41	105,16
2018	298.788	1,35	104,96
2019	302.623	1,28	104,76
2020	306.322	1,22	104,57
2021	309.904	1,17	104,38

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015–2025



Gambar 1.1 Rasio Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2017-2021

Dilihat dari laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai pada tahun 2021 tercatat sebesar 1,17 persen atau terjadi perlambatan pertumbuhan penduduk bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan, pada tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai mencapai 1,41 persen. Perlambatan pertumbuhan dari tahun ke tahun dapat menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kota Dumai.

Bila dilihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), rasio jenis kelamin penduduk Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 104,38. Ini berarti bahwa, dari setiap 100 penduduk perempuan, ada sebanyak 104 penduduk laki-laki. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Kota Dumai lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kota Dumai pada lima tahun terakhir berkisar pada angka 104 dan 105.

Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Salah satu persoalan terkait kependudukan yang masih harus dihadapi di tingkat nasional dan juga di Kota Dumai adalah masalah ketimpangan distribusi penduduk. Ketimpangan distribusi penduduk terjadi di desa dan kota. Distribusi penduduk yang tidak merata menimbulkan masalah pada kepadatan penduduk dan tekanan penduduk di suatu wilayah. Ada beberapa wilayah yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, di wilayah lain masih ada wilayah yang hanya dihuni oleh jumlah penduduk yang relatif sedikit. Hal ini sangat berpengaruh pada kondisi masyarakat setempat.

Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan kebutuhan lahan untuk pemukiman,

serta tidak memadainya akses fasilitas pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah sosial lainnya. Di sisi lainnya, wilayah dengan dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit akan memunculkan persoalan optimalisasi sumber daya alam terkait dengan kekurangan tenaga kerja padahal wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk (jiwa per km²) Kota Dumai menurut Kecamatan Tahun 2019-2020

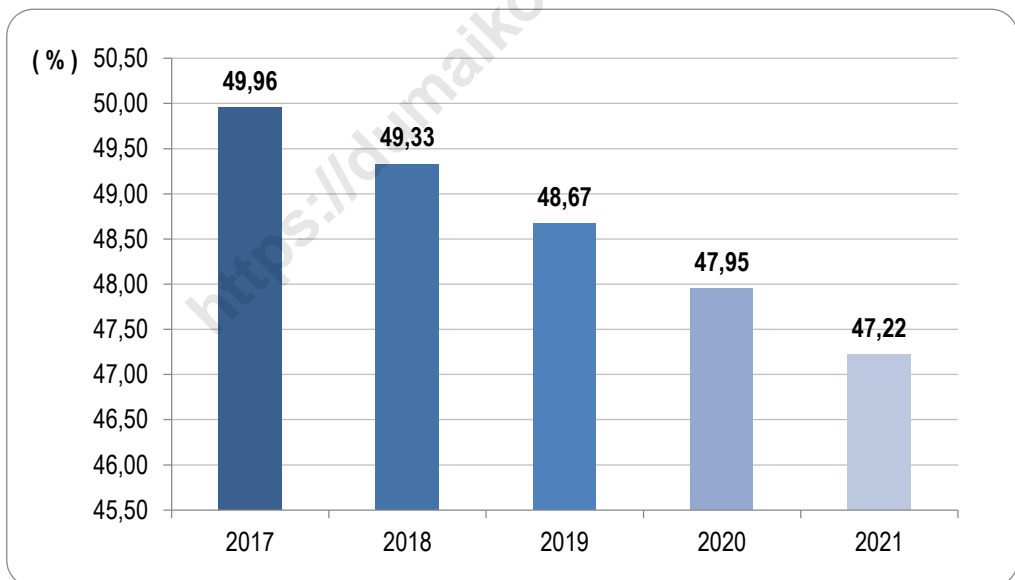
Kecamatan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Bukit Kapur	238	258
Medang Kampai	33	45
Sungai Sembilan	35	43
Dumai Barat	981	985
Dumai Selatan	755	718
Dumai Timur	1.398	1.451
Dumai Kota	3.762	3.129
Kota Dumai	179	183

Sumber: Badan Pusat Statistik, Kota Dumai Dalam Angka 2020-2021

Dumai merupakan kota dengan kepadatan tertinggi kedua dan luas geografis terkecil kedua di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Kedua kota tersebut memiliki angka kepadatan penduduk lebih tinggi daripada kepadatan penduduk Provinsi Riau. Kepadatan penduduk pada setiap kecamatan di Kota Dumai dapat menjadi ukuran ketimpangan distribusi penduduk. Berdasarkan kecamatan di Kota Dumai, Kecamatan Dumai Kota merupakan kecamatan paling padat dengan kepadatan penduduk mencapai 3.129 jiwa per km² pada tahun 2020. Angka ini mencapai 21 kali lipat kepadatan penduduk Kota Dumai. Sementara itu, kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah adalah Kecamatan Sungai Sembilan yang hanya sebesar 43 jiwa per km².

Angka Beban Ketergantungan

Angka Beban Ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang tak kalah penting. Semakin tingginya persentase angka beban ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif (15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (di bawah 15 tahun) dan tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Persentase angka beban ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015–2025 (diolah)

Gambar 1.2 Angka Beban Ketergantungan (%) Kota Dumai Tahun 2016-2020

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur, di mana persentase penduduk usia produktif meningkat dalam tiga tahun terakhir, sehingga angka beban ketergantungan yang menurun. Semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan

memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selama periode 2017—2021, angka beban ketergantungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka beban ketergantungan di Kota Dumai sebesar 47,22 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 penduduk usia tidak produktif.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun). Pada tahun 2021, terdapat sekitar 28,36 persen penduduk berumur 0-14 tahun.

Rasio ketergantungan yang cenderung terus menurun belakangan ini diperkirakan akan mencapai titik terendah pada periode 2020—2030. Pada periode itu, akan terdapat peluang lebih besar untuk melakukan investasi sumber daya manusia guna mendorong produksi. Penduduk usia produktif dapat mendorong ekonomi untuk tumbuh jika sebagian besar dari mereka bekerja. Akan tetapi, di sisi lain, mereka dapat menciptakan instabilitas sosial dan politik jika di antara mereka banyak yang tidak bekerja. Dalam kondisi tersebut, mereka dikatakan usia produktif tapi tidak dapat dimanfaatkan karena tidak terserap di pasar kerja.

Tabel 1.3 Komposisi Penduduk (%) dan Angka Beban Ketergantungan (%) di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Tahun	Komposisi Penduduk (%)			Angka Beban Ketergantungan (%)
	0-14 tahun	15-64 tahun	65+ tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019	29,48	67,27	3,26	48,67
2020	28,93	67,59	3,48	47,95
2021	28,36	67,92	3,71	47,22

Sumber: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Riau 2015–2025 (diolah)

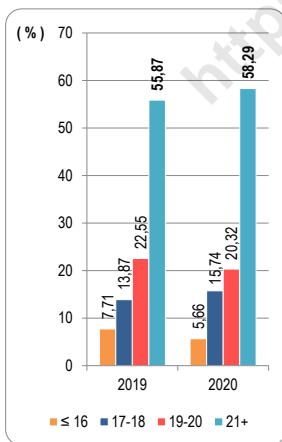
Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 1.3 menunjukkan bahwa ada sebanyak 29,48 persen penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) pada tahun 2019 dan kemudian menurun menjadi 28,36 persen pada tahun 2021.

Sementara itu, penduduk usia produktif semakin mendominasi. Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2015—2025, penduduk usia produktif mencapai 67,27 persen pada tahun 2019, kemudian meningkat pada tahun 2020, hingga pada tahun 2021 mencapai 67,92 persen dari populasi penduduk Kota Dumai. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Kota Dumai semakin berpotensi menjadi modal dasar yang besar untuk pembangunan. Sementara itu, proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) semakin bertambah dari 3,26 persen pada tahun 2019 menjadi 3,71 persen pada tahun 2021.

Wanita Menurut Usia Perkawinan Pertama

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang memengaruhi jumlah penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan pertambahan penduduk yang meningkat. Angka fertilitas yang tidak dapat terkendali akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk, sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadikan beban negara semakin berat dan berisiko menghambat pembangunan nasional.

Salah satu persoalan penduduk yang dapat memicu tingginya pertambahan jumlah penduduk yaitu tingginya angka kelahiran di suatu daerah. Banyaknya kelahiran dari seorang wanita dapat dipengaruhi oleh masa reproduksinya. Semakin panjang masa reproduksi seorang wanita, kemungkinan semakin banyak anak yang dilahirkan. Semakin muda usia seseorang saat melaksanakan perkawinan pertama, semakin panjang masa reproduksinya.



Gambar 1.3 Persentase Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Tabel 1.4 Persentase (%) Perempuan Berumur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Umur Perkawinan Pertama (tahun)	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
≤ 16	7,71	5,66
17-18	13,87	15,74
19-20	22,55	20,32
21+	55,87	58,29
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

Terdapat beberapa sumber mengenai batasan usia minimal seorang wanita untuk melakukan perkawinan pertama, di antaranya sebagai berikut:

syarat menikah untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun, sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak usia minimal untuk menikah yaitu sudah berumur 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi seseorang idealnya adalah 21-25 tahun.

Usia subur bagi seorang wanita adalah pada usia 15-49 tahun. Pada rentang tersebut, kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar pada kelompok umur 19-20 tahun, sementara kelompok umur 21 tahun ke atas mempunyai tingkat fertilitas tertinggi. Hal ini disebabkan karena usia tersebut merupakan usia paling produktif untuk melahirkan anak, di mana pada usia tersebut alat reproduksi wanita sudah sangat baik dan sempurna. Selain itu, tabel tersebut juga menggambarkan bahwa terjadi pergeseran persentase wanita kawin di usia 16 tahun ke bawah yang menunjukkan kecenderungan semakin baik, yaitu dari 7,71 persen pada tahun 2019 menjadi 5,66 persen pada tahun 2020. Secara umum, di Kota Dumai, sebagian besar wanita

yang pernah kawin melakukan perkawinan pertamanya pada usia 21 tahun ke atas.

Penggunaan Alat/Cara KB

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak, dan kematian ibu. Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) selaku instansi pemerintah yang menangani program KB ini mengharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat, terutama untuk kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implan. Dengan cakupan KB yang meningkat, diharapkan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan lebih baik lagi. Lambatnya kenaikan angka cakupan ber-KB dipicu oleh beberapa faktor, utamanya adalah masih tingginya kelompok yang tidak terlayani program KB (*unmet need*) dengan berbagai alasan dan kendala. Selain itu adalah makin sedikitnya akseptor KB yang memiliki KB dengan metode jangka panjang, sehingga angka *drop out* KB menjadi tinggi.

Berdasarkan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) pada tahun 2019 dan 2020, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang pernah kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai di atas 30 persen yaitu masing-masing sebesar 37,51 persen pada tahun 2019 dan 41,97 persen pada tahun 2020.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka

panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim risiko kegagalan dan risiko efek samping terhadap kesehatan pemakaian, serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Tabel 1.5 Persentase (%) Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin yang Menggunakan Alat KB atau Cara Tradisional untuk Menunda atau Mencegah Kehamilan menurut Alat KB atau Cara Tradisional yang Digunakan di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Alat KB atau Cara Tradisional yang Sedang Digunakan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sterilisasi Wanita / Tubektomi / MOW	6,70	8,43
Sterilisasi Pria / Vasektomi / MOP	0,00	0,00
IUD / AKDR / Spiral	4,54	8,31
Suntikan	45,27	47,26
Susuk KB / Implan	9,36	10,31
Pil	25,52	12,30
Kondom Pria / Karet KB	3,29	7,14
Intravag / Kondom Wanita / Diafragma*	-	0,60
Metode Menyusui Alami	1,99	0,47
Pantang Berkala / Kalender	2,48	2,84
Lainnya	0,86	2,34
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

Catatan:

*) Klasifikasi tersedia pada tahun 2020

Tabel 1.5 memperlihatkan bahwa dari berbagai macam alat/cara KB yang digunakan, suntikan dan pil merupakan yang paling banyak diminati. Penggunaan suntikan mengalami peningkatan dari sebesar 45,27 persen pada tahun 2019 menjadi 47,26 persen pada tahun 2020. Sementara itu, penggunaan pil

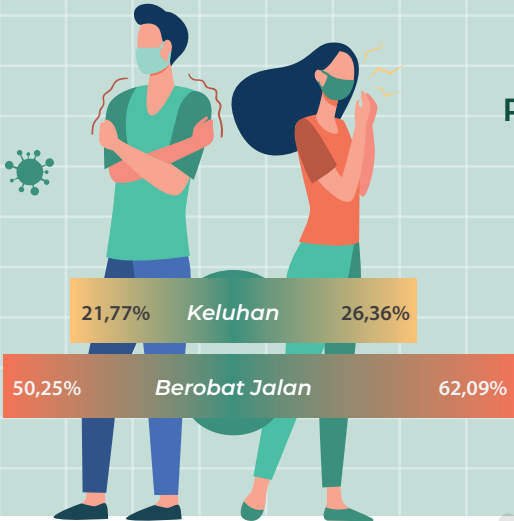
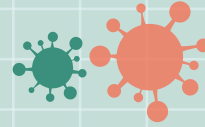
mengalami penurunan persentase penggunaan dari 25,52 persen pada tahun 2019 menjadi 12,30 persen pada tahun 2020.

Jenis alat/cara KB yang sedikit penggunaannya adalah sterilisasi pria/vasektomi/MOP, metode menyusui alami, intravag/kondom wanita/diafragma, alat/cara lainnya, dan pantang berkala/kalender yang masing-masing persentasenya kurang dari 5 persen pada tahun 2020. Jika dilihat pertumbuhannya, alat/cara KB yang persentase penggunaannya menurun adalah pil dan metode menyusui alami.

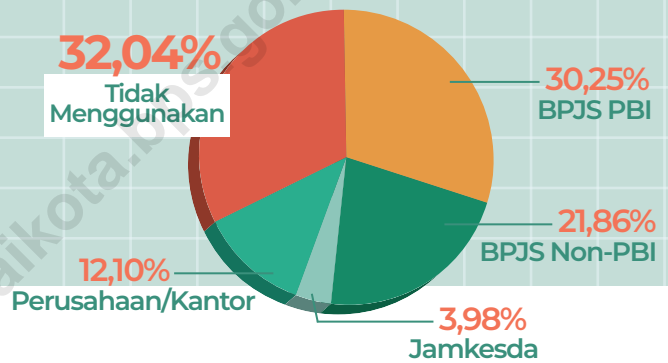
<https://dumaikota.bps.go.id>



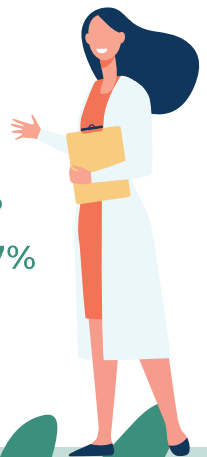
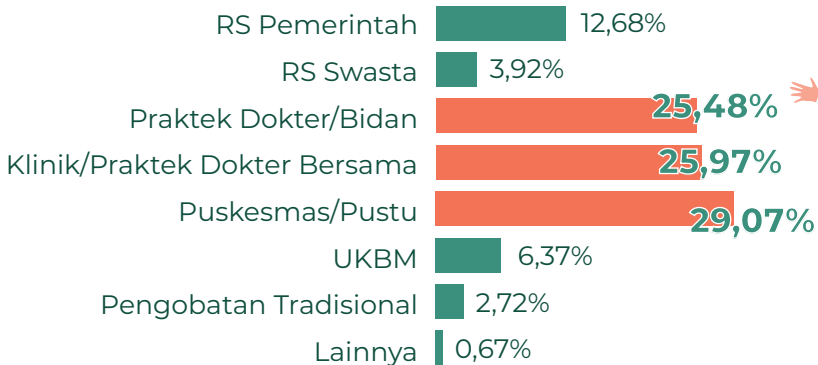
Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Penduduk yang Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020



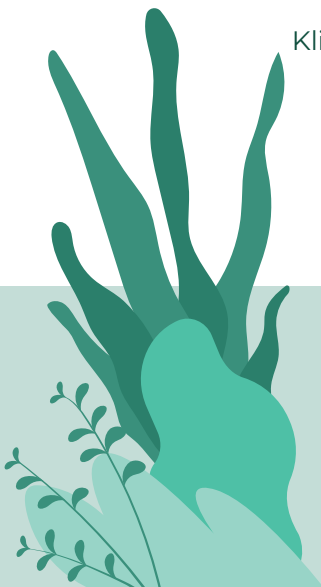
Persentase Penduduk menurut Penggunaan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan di Kota Dumai Tahun 2020



Persentase Penduduk menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Dumai Tahun 2020



KESEHATAN & GIZI



BAB II

Kesehatan & Gizi

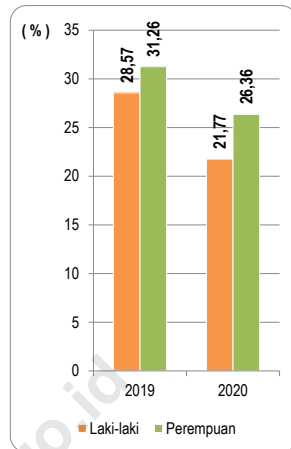


Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Masyarakat yang sehat akan mendukung proses perekonomian dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah dengan baik, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya berupa kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan, seperti puskesmas, yang sasaran utamanya untuk menurunkan tingkat kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan angka harapan hidup.

Upaya pemerintah berupa program-program pembangunan yang telah dilakukan di antaranya adalah dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu & berkualitas, merata, serta terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah, meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes dan posyandu, serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya

gangguan/ keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya, keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dan semakin tinggi angka kesakitan di wilayah tersebut.



Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Hasil Susenas Maret menunjukkan persentase penduduk di Kota Dumai yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah 24,00 persen atau menurun 5,44 persen dibanding tahun 2019. Adapun menurut jenis kelamin, pada tahun 2020, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan yang lebih tinggi dari pada laki-laki juga terjadi pada tahun sebelumnya.

Tabel 2.1 Persentase (%) Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin di Kota Dumai Tahun 2020

Indikator	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan	21,77	26,36	24,00
Persentase penduduk yang berobat jalan	50,25	62,09	56,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa lebih dari setengah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir memilih mengobati keluhannya dengan berobat jalan, yaitu mencapai 56,57 persen pada tahun 2020. Persentase penduduk

yang berobat jalan pada setiap klasifikasi jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, juga sudah melebihi setengah populasi, yaitu 50,25 persen untuk penduduk laki-laki dan 62,09 persen untuk penduduk perempuan. Persentase penduduk perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki mengandung arti bahwa kesadaran penduduk perempuan terhadap kesehatannya lebih baik daripada laki-laki.

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan

Pemerintah telah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014 yang bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan finansial. Kepemilikan jaminan kesehatan berhubungan dengan kesiapan seseorang dalam menghadapi risiko kesehatan yang akan ditanggung di masa datang. Dengan memiliki jaminan kesehatan, seseorang akan memperoleh bantuan pembiayaan kesehatan ketika melakukan perawatan di fasilitas kesehatan.

Tabel 2.2 Persentase (%) Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Jenis Kelamin dan Jaminan Kesehatan yang Digunakan di Kota Dumai Tahun 2020

Indikator	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
BPJS Kesehatan PBI	25,92	33,32	30,25
BPJS Kesehatan Non-PBI	25,30	19,43	21,86
Jamkesda	4,06	3,93	3,98
Asuransi Swasta	0,00	0,00	0,00
Jaminan Kesehatan Perusahaan/Kantor	11,67	12,40	12,10
Tidak Menggunakan Jaminan	33,61	30,93	32,04

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020

Kepemilikan jaminan kesehatan juga perlu diimbangi dengan pemanfaatannya. Tabel 2.2 menunjukkan bahwa sebanyak 32,04 persen penduduk tidak memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Penduduk laki-laki yang tidak memanfaatkan jaminan kesehatan untuk berobat jalan sebesar 33,61 persen, lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang sebesar 30,93 persen. Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan penduduk Kota Dumai adalah BPJS Kesehatan, baik Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non-PBI.

Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Pada umumnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk. Sepanjang tahun 2019, fasilitas kesehatan yang lebih banyak dimanfaatkan penduduk di Kota Dumai untuk berobat jalan adalah praktek dokter/bidan sekitar 39,77 persen. Sementara itu, pada tahun 2019, fasilitas kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan adalah puskesmas/pustu. Meski menjadi faskes yang paling banyak dimanfaatkan penduduk pada dua tahun terakhir, penduduk yang berobat di keduanya (praktek dokter/bidan dan puskesmas/pustu) mengalami penurunan persentase di tahun 2020. Persentase penduduk yang berobat jalan meningkat pada fasilitas kesehatan: RS pemerintah, RS swasta, klinik/praktek dokter bersama, UKBM, dan praktik pengobatan tradisional.

Secara menyeluruh, kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih lebih besar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan tradisional. Hal ini menunjukkan tingginya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, di mana hal tersebut juga merupakan salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi di Kota

Dumai sudah baik. Meski menunjukkan persentase yang rendah, praktek pengobatan tradisional perlu diperhatikan oleh pemerintah karena pemanfaatan fasilitas kesehatan tersebut meningkat 1,84 persen dari tahun 2019 ke tahun 2020.

Tabel 2.3 Persentase (%) Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Dumai Tahun 2019-2020

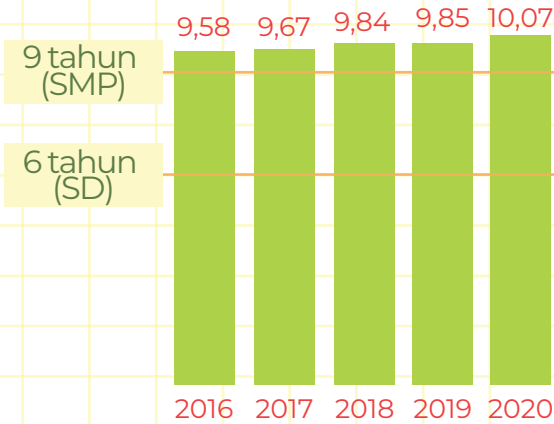
Tempat Berobat	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
RS Pemerintah	9,18	12,68
RS Swasta	1,80	3,92
Praktek Dokter/Bidan	39,77	25,48
Klinik/Praktek Dokter Bersama	20,27	25,97
Puskesmas/Pustu	33,13	29,07
UKBM*	0,83	6,37
Praktik Pengobatan Tradisional	0,88	2,72
Lainnya	1,79	0,67

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

Keterangan:

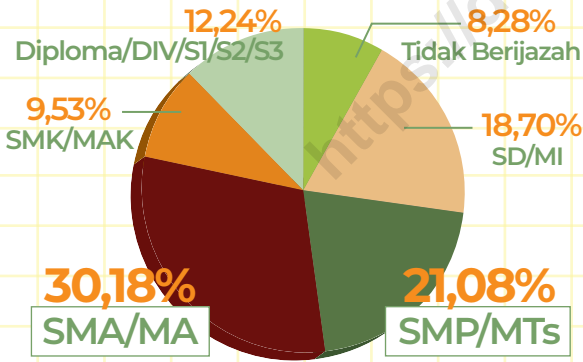
*) UKBM terdiri dari Poskesdes, Polindes, Posyandu, Balai Pengobatan

**Rata-rata Lama Sekolah
di Kota Dumai Tahun 2016-2020**



Secara rata-rata, penduduk mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMA.

Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020



**Angka Melek Huruf (AMH)
Kota Dumai Tahun 2020**

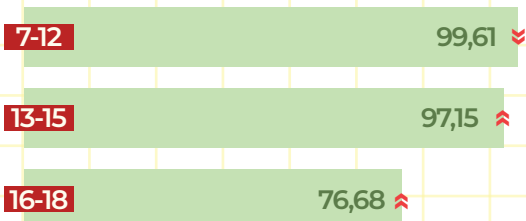


Sebanyak 99,51 persen penduduk bisa membaca dan menulis.



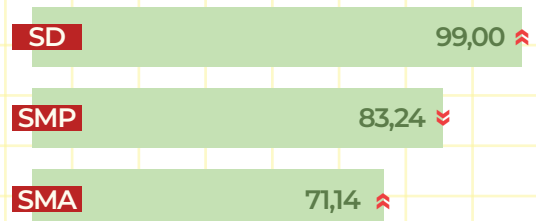
PENDIDIKAN

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)
menurut Kelompok Umur
di Kota Dumai Tahun 2020**



↕ dibandingkan tahun 2019

**Angka Partisipasi Murni (APM)
menurut Tingkat Pendidikan
di Kota Dumai Tahun 2020**



↕ dibandingkan tahun 2019



BAB III

Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender, sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup, sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan bagi tiap warganya melalui sekolah yang terjangkau dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan, dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan

prasarana, kurikulum, serta sumber belajar dan daya dukung lainnya juga perlu diupayakan pemerintah.

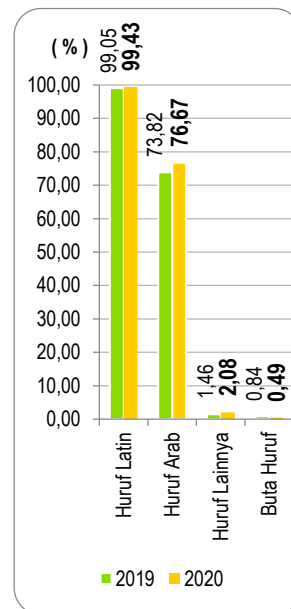
Beberapa indikator yang akan disajikan di dalam publikasi ini, diantaranya Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator-indikator tersebut diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS.

Angka Melek Huruf (AMH)

Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab. Penyelenggaraan pendidikan, dalam pelaksanaannya memerlukan kecakapan tersebut. Selain itu, dengan kecakapan tersebut, memungkinkan bagi seseorang untuk memanfaatkannya dalam pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Baik angka melek huruf maupun angka buta huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Program pemberantasan buta huruf mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca dan menulis dengan huruf latin dan berhitung serta berketrampilan. Dengan kemampuan yang dimiliki tersebut memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan lainnya adalah menciptakan tenaga lokal yang potensial guna mengelola sumber daya yang ada di lingkungannya.

Di Kota Dumai, penduduk yang dapat membaca dan menulis (melek huruf) sebesar 99,51 persen pada tahun 2020 (Gambar 3.1). Angka ini menunjukkan tingginya kemampuan membaca dan menulis masyarakat secara umum sebagai bentuk



Gambar 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15+ Tahun menurut Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Dumai Tahun 2019-2020

keberhasilan pemberantasan buta aksara, bahkan semakin membaik dibandingkan AMH pada tahun 2019 yang sebesar 99,16 persen. Peningkatan AMH didukung dengan peningkatan kemampuan membaca dan menulis untuk semua klasifikasi kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya. AMH tertinggi pada dua tahun terakhir berada pada kemampuan membaca dan menulis huruf latin, yaitu lebih dari 99 persen. Adapun peningkatan AMH tertinggi pada dua tahun terakhir berada pada kemampuan membaca dan menulis huruf arab, yaitu dari 73,82 persen menjadi 76,67 persen. Jika AMH penduduk berdasarkan jenis kelamin diperbandingkan (Tabel 3.1), maka AMH penduduk laki-laki pada tahun tahun 2020 lebih besar jika dibandingkan AMH penduduk perempuan.

Tabel 3.1 Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Kemampuan Membaca dan Menulis di Kota Dumai Tahun 2020

Jenis Kelamin	Kemampuan Membaca dan Menulis	Persentase
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	Huruf Latin	99,71
	Huruf Arab	78,86
	Huruf Lainnya	2,21
	Buta Huruf	0,29
Perempuan	Huruf Latin	99,13
	Huruf Arab	74,56
	Huruf Lainnya	1,95
	Buta Huruf	0,70
Laki-laki + Perempuan	Huruf Latin	99,43
	Huruf Arab	76,67
	Huruf Lainnya	2,08
	Buta Huruf	0,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2020

Walaupun program pemberantasan buta aksara telah menuju arah keberhasilan, program ini harus terus dilakukan sehingga angka buta aksara masyarakat dapat terus ditekan tiap tahunnya. Keberhasilan yang telah dicapai telah menumbuhkan

semangat dari pemerintah untuk terus memacu percepatan penurunan angka buta aksara dengan menggalang kerja sama dengan berbagai pihak, seperti dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi perempuan, organisasi keagamaan, dan swasta. Dengan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah semakin optimis bahwa angka buta aksara akan terus mengalami penurunan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

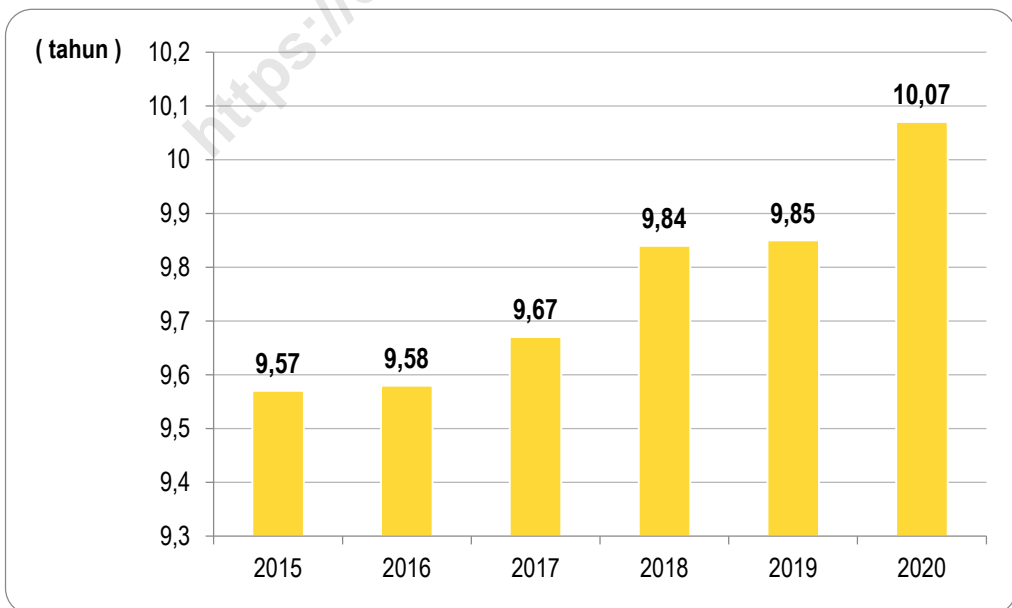
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah diartikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).

Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di sektor pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin tinggi angka IPM, yang mencerminkan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan meningkatkan fasilitas pendidikan dan akses jalan hingga ke pelosok daerah agar menghindari anak putus sekolah. Di samping itu, pemerintah juga menggalakkan sekolah gratis, beasiswa bagi siswa miskin, serta penyetaraan ijazah bagi mereka yang putus sekolah.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan waktu rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, sehingga memperkecil angka putus sekolah dan meningkatkan jumlah angka yang melanjutkan antar jenjang pendidikan. Salah

satu cara efektif untuk menaikkan waktu rata-rata lama sekolah bukan dengan menyekolahkan kembali penduduk Indonesia khususnya di Kota Dumai yang telah berusia lanjut, tetapi mengupayakan agar tidak ada lagi peserta didik yang putus sekolah. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan partisipasi sekolah jenjang pendidikan dasar yang bermutu, meningkatkan akses dan mutu pendidikan menengah, meningkatkan akses dan daya saing pendidikan tinggi, serta meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada tahun 2020, rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Dumai telah bersekolah lebih dari 10 tahun. RLS di Kota Dumai sebesar 10,07 tahun, kembali mengalami kenaikan dari tahun 2019 (9,85 tahun). Angka ini berarti rata-rata penduduk di Kota Dumai mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 1 SMA, memasuki kelas 2 SMA tetapi belum tamat.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Gambar 3.2 Rata-rata Lama Sekolah (tahun) di Kota Dumai Tahun 2015-2020

Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari keahlian/keterampilan serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang dapat digambarkan dari tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang pendidikan yang tinggi dapat mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian yang tinggi.

Dengan keterampilan/keahlian yang lebih tinggi, akan semakin mudah bagi seseorang untuk mendapatkan kesempatan bekerja. Indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan juga dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Tabel 3.2 Persentase (%) Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Tidak Mempunyai Ijazah	9,95	8,28
SD/MI	18,77	18,70
SMP/MTs	20,72	21,08
SMA/MA	29,68	30,18
SMK/MAK	9,42	9,53
Diploma I dan Diploma II	0,14	0,22
Akademi / Diploma III	3,50	2,83
DIV/S1/Profesi/S2/S3	7,81	9,19
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang menamatkan jenjang pendidikan SMP ke atas mencapai 73,03 persen, sementara capaian pada tahun 2019 lebih rendah, yaitu 71,27 persen. Artinya, semakin besar persentase penduduk yang telah menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun. Bahkan, pada setiap jenjang pendidikan SMP ke atas, persentasenya

juga meningkat, kecuali pada jenjang pendidikan diploma I dan diploma II. Jenjang pendidikan yang paling banyak ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas adalah SMA/MA yang mencapai lebih dari seperempat populasi, yaitu 30,18 persen pada tahun 2020. Setelah SMA/MA, jenjang berikutnya yang banyak ditamatkan adalah SMP/MTs (21,08 persen) dan SD/MI (18,70 persen). Kondisi ini tidak jauh berbeda dalam dua tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa struktur penduduk di Kota Dumai tidak mengalami banyak perubahan dari sisi pendidikan, yaitu masih didominasi tamatan SMA/MA, SMP/MTs, dan SD/MI.

Pada tahun 2020, penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai ijazah mengalami penurunan dari 9,95 persen menjadi 8,28 persen. Dari seluruh tingkat pendidikan, hanya pada tingkat pendidikan: (1) SD/MI, (2) diploma I dan diploma II, serta (3) akademi/diploma III yang persentasenya juga menurun, sementara pada tingkat pendidikan lainnya meningkat. Peningkatan persentase tertinggi berada pada jenjang pendidikan tertinggi, yaitu DIV/S1/Profesi/S2/S3, di mana peningkatannya mencapai 1,38 persen dari tahun 2019 ke 2020.

Tingkat Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan dari berbagai jenjang pendidikan dan kelompok umur. Tingkat partisipasi sekolah yang dapat diukur di antaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Pemerintah berharap agar kedua indikator tersebut selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Peningkatan indikator ini menunjukkan semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh layanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan berkesetaraan.

Secara umum, APS penduduk berumur 7-12 tahun sebesar 99,61 persen pada tahun 2020 atau mengalami penurunan dari tahun 2019 yang mencapai 99,85 persen. Sementara itu, APS penduduk berumur 13-15 tahun sebesar 97,15 persen atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 97,05 persen. Demikian juga APS penduduk berumur 16-18 tahun yang mengalami peningkatan dari 74,99 persen menjadi 76,68 persen. Peningkatan APS pada dua kelompok umur yang lebih tinggi menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan menengah semakin meluas dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun penurunan APS pada kelompok umur 7-12 tahun dapat mengindikasikan adanya kecenderungan masyarakat untuk menunda memberikan pendidikan dasar untuk anaknya di pada tahun 2020.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Kelompok Umur di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Kelompok Umur	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
7-12	99,85	99,61
13-15	97,05	97,15
16-18	74,99	76,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

Secara umum, APM SD sebesar 99,00 persen pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 98,93 persen. Sementara itu, APM SMP mengalami penurunan dari 84,19 persen menjadi 83,24 persen. Adapun APM SMA/SMK mengalami peningkatan dari 71,08 persen menjadi 71,14 persen. Peningkatan APM pada kategori SD dan SMA/SMK menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan persentase penduduk yang bersekolah tepat waktu sesuai jenjang

pendidikannya (7-12 tahun untuk SD/ sederajat dan 16-18 tahun untuk SMA/SMK/ sederajat).

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun menurut Jenjang Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Jenjang Pendidikan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
SD	98,93	99,00
SMP	84,19	83,24
SMA	71,08	71,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Dumai Tahun 2021

64,91

Dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, terdapat 65 angkatan kerja.

Dari setiap 100 angkatan kerja, terdapat 6 pengangguran.

6,29

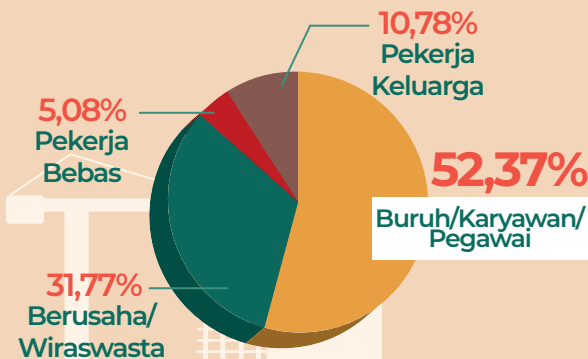
TPAK TPT

Angkatan Kerja

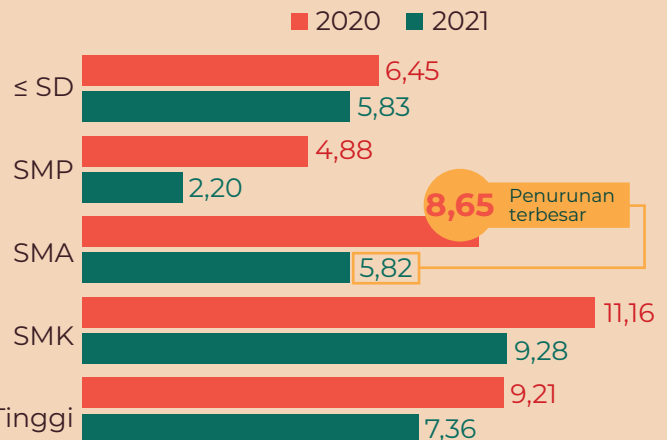
Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja + sementara tidak bekerja + pengangguran

KETENAGAKERJAAN

Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan di Kota Dumai Tahun 2021



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2020-2021





BAB IV

Ketenagakerjaan

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang dapat berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan nasional dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Indikator tersebut antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, serta persentase pengangguran menurut

tingkat pendidikan. Dalam publikasi ini menampilkan data ketenagakerjaan tahun 2019, 2020, dan 2021.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Dumai Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
TPAK	69,12	67,15	64,91
TPT	6,30	8,19	6,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2019-2021 (diolah)

Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran

terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja di Kota Dumai pada tahun 2021 mencapai 144.465 orang, berkurang secara absolut sebanyak 2.121 orang dibanding tahun 2020 (146.586 orang). Penurunan jumlah angkatan kerja pada tahun 2021 diikuti dengan penurunan persentase TPAK pada tahun 2021. Persentase TPAK mengalami penurunan sebesar 2,24 persen, dari 67,15 persen pada tahun 2020 menjadi 64,91 persen pada tahun 2021. Dalam tiga tahun terakhir, angka TPAK selalu menurun, yang menunjukkan bahwa pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kota Dumai semakin sedikit.

Berbeda dengan TPAK yang menurun dalam tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 8,19 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 6,29 persen. Penurunan angka TPT pada tahun 2021 mengandung makna bahwa semakin banyak persediaan tenaga kerja yang telah dimanfaatkan

Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan status pekerjaan utama, selama tiga tahun terakhir, total penduduk Kota Dumai yang bekerja didominasi oleh kelompok buruh/karyawan/pegawai yang persentasenya mencapai 54,30 persen pada tahun 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020. Persentase penduduk yang berusaha juga mengalami peningkatan pada tahun 2021. Sementara itu, kelompok pekerja bebas dan pekerja keluarga mengalami penurunan persentase, masing-masing menjadi 4,23 persen dan 9,14 persen pada tahun 2021.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2019-2021

Status Pekerjaan Utama	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji (Buruh/Karyawan/Pegawai)	54,82	52,37	54,30
Berusaha/Wiraswasta	32,79	31,77	32,32
Berusaha sendiri	18,89	16,54	18,44
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	8,99	10,36	10,23
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	4,91	4,88	3,65
Pekerja bebas	4,59	5,08	4,23
Pekerja Keluarga	7,80	10,78	9,14
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2019-2021 (diolah)

Pola pada tiga tahun terakhir dapat menjelaskan bahwa, jika persentase kelompok buruh/karyawan/pegawai dan berusaha/wiraswasta meningkat, maka akan mendorong penurunan persentase kelompok pekerja bebas dan pekerja keluarga. Kelompok buruh/karyawan/pegawai yang kehilangan pekerjaan dan pengusaha yang menghentikan usahanya di tahun 2020 akan cenderung beralih menjadi pekerja bebas atau pekerja keluarga. Kelompok ini bekerja di usaha orang lain secara tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam satu bulan terakhir) untuk menerima pendapatan atau membantu usaha keluarga karena belum ada pekerjaan lain baginya. Kemudian, pada tahun 2021, kondisi perekonomian Kota Dumai memicu perluasan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat berpeluang mempunyai pekerjaan kembali, baik menjadi buruh/karyawan/pegawai maupun dengan berusaha.

Penduduk yang Bekerja Menurut Pendidikan

Setiap orang selalu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak yang sesuai dengan keahlian yang dia miliki serta tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan mereka tidak terserap pada lapangan usaha tersebut. Sebagian besar dari mereka yang merupakan lulusan pendidikan tinggi enggan menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis keahlian dan jenjang pendidikan yang telah ia tamatkan, sehingga sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan menjadi penganggur.

Tabel 4.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Tingkat Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2019-2021

Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	Tahun		
	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak memiliki ijazah SD / Memiliki ijazah SD	2,50	6,45	5,83
SMP	4,83	4,88	2,20
SMA	4,24	8,65	5,82
SMK	14,63	11,16	9,28
Perguruan Tinggi	6,53	9,21	7,36
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,30	8,19	6,29

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sakernas Agustus 2019-2021 (diolah)

Bila dilihat berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan, tingkat pendidikan SMK merupakan kelompok penduduk dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 14,63 pada tahun 2019, menurun menjadi 11,16 pada tahun 2020, dan kembali menurun menjadi 9,28 pada

tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan bahwa semakin banyak lulusan SMK yang terserap di lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2021, TPT tertinggi berikutnya setelah tamatan SMK adalah pada kelompok tamatan perguruan tinggi sebesar 7,36 persen, diikuti kelompok tamatan SD ke bawah sebesar 5,83 persen, tamatan SMA sebesar 5,82 persen, dan tamatan SMP sebesar 2,20 persen. Angka ini menunjukkan bahwa TPT di Kota Dumai bernilai tinggi pada kelompok tamatan SMK dan perguruan tinggi, sama halnya dengan yang terjadi pada tahun 2019 dan tahun 2020. Artinya, lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Dumai tidak sesuai dengan keahlian dan keterampilan khusus yang dimiliki para pencari pekerjaan lulusan SMK dan perguruan tinggi.

Kondisi pengangguran di Kota Dumai diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja yang sesuai dengan tingkat keahlian penduduk. Pembukaan lapangan kerja baru bagi mereka di Kota Dumai akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan. Adapun penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwira usaha, sehingga dapat turut serta membangun daerahnya karena telah membantu perluasan lapangan pekerjaan baru. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwira usaha.

Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kota Dumai Tahun 2021



Rp1.557.833,00

meningkat 2,13 persen
dibandingkan tahun 2020

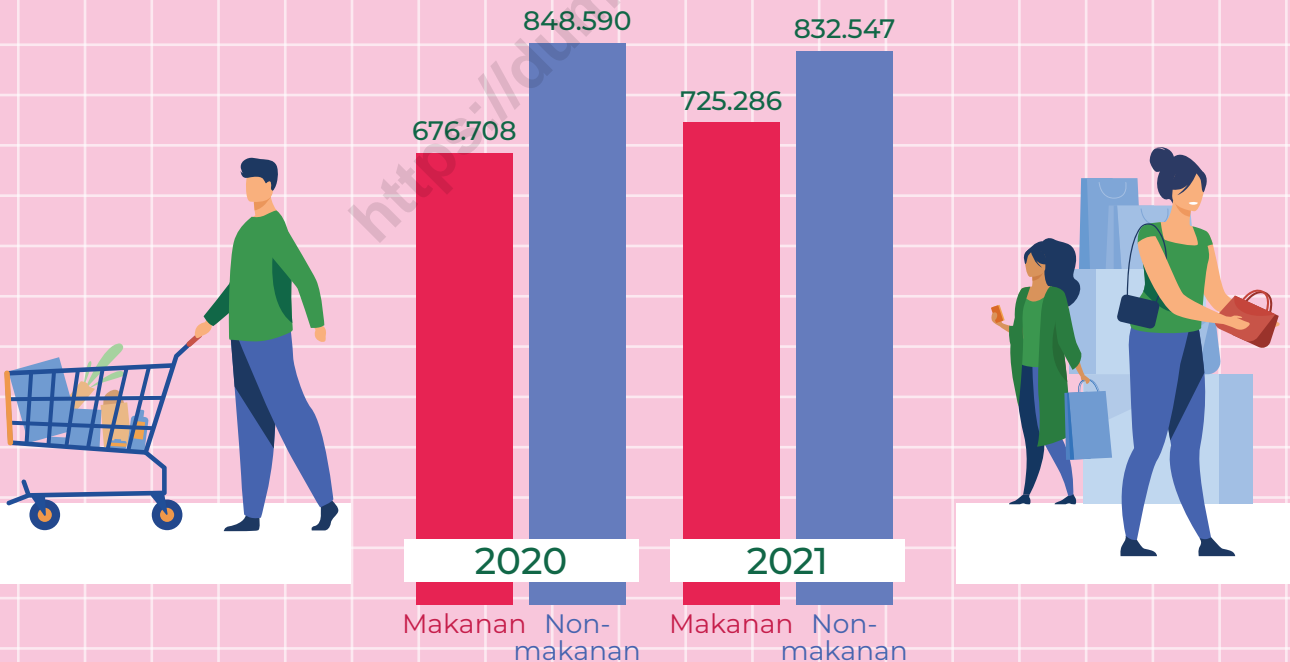


Pengeluaran Makanan
46,56 %
didominasi makanan
dan minuman jadi



Pengeluaran Non-makananan
53,44 %
didominasi perumahan
dan fasilitas rumah tangga

Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp) menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2020-2021



TARAF & POLA KONSUMSI



Tarif & Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk nonmakanan.

Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi.

Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh,

sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

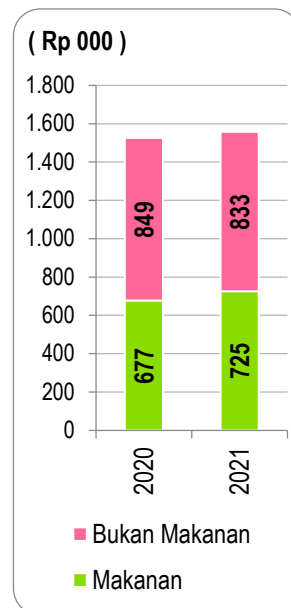
Tabel 5.1 Nilai (rupiah) dan Persentase (%) Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai Tahun 2020-2021

Kelompok Komoditas	Nilai (Rp)		Persentase (%)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	676.708	725.286	44,37	46,56
Bukan Makanan	848.590	832.547	55,63	53,44
Jumlah	1.525.298	1.557.833	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Kota Dumai 2020-2021

Tabel 5.1 menyajikan data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan tahun 2020 dan 2021. Dari tabel tersebut terlihat bahwa, selama periode 2020-2021, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk meningkat dari Rp1.525.298,00 menjadi Rp1.557.833,00. Bila dilihat distribusinya, pengeluaran untuk makanan meningkat dari 44,37 persen pada tahun 2020 menjadi 46,56 persen pada tahun 2021. Sebaliknya, proporsi untuk pengeluaran bukan makanan mengalami penurunan dari 55,63 persen menjadi 53,44 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sumber peningkatan rata-rata pengeluaran penduduk adalah dari peningkatan pengeluaran untuk konsumsi makanan.

Jika dirinci menurut komoditas (Tabel 5.2), maka dapat diketahui bahwa komoditas makanan yang mengalami peningkatan proporsi tertinggi adalah tembakau dan sirih, yaitu meningkat 0,87 persen dari tahun 2020 ke tahun 2021. Selain komoditas tersebut, sayur-sayuran dan ikan juga mengalami peningkatan proporsi



Gambar 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp 000) menurut Jenis Pengeluaran di Kota Dumai Tahun 2020-2021

pengeluaran yang cukup besar. Ketiga komoditas tersebut memiliki proporsi dalam pengeluaran penduduk sekitar 4,13 hingga 6,78 persen. Sementara itu, penurunan proporsi pengeluaran tertinggi pada komoditas nonmakanan adalah barang tahan lama, yaitu menurun signifikan sebesar 1,89 persen.

Tabel 5.2 Distribusi Pengeluaran Perkapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas di Kota Dumai Tahun 2020-2021

Kelompok Komoditas	Tahun	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
A. Makanan	44,37	46,56
1. Padi-padian	4,49	4,46
2. Umbi-umbian	0,42	0,43
3. Ikan	5,03	5,33
4. Daging	1,55	1,65
5. Telur dan Susu	2,78	3,03
6. Sayur-sayuran	3,80	4,13
7. Kacang-kacangan	0,60	0,64
8. Buah-buahan	2,27	2,03
9. Minyak dan Lemak	1,30	1,50
10. Bahan Minuman	1,12	1,32
11. Bumbu-bumbuan	0,62	0,79
12. Konsumsi Lainnya	0,63	0,82
13. Makanan dan Minuman Jadi	13,83	13,64
14. Tembakau dan Sirih	5,91	6,78
B. Bukan Makanan	55,63	53,44
1. Perumahan dan fasilitas rumah tangga	26,03	27,00
2. Aneka Barang dan Jasa	11,76	11,12
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	3,77	3,39
4. Barang yang Tahan Lama	8,73	6,84
5. Pajak dan Premi Asuransi	3,46	4,27
6. Keperluan Pesta dan Upacara	1,88	0,83
Total	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Kota Dumai 2020-2021 (diolah)

98,67%
rumah tangga

tinggal di rumah beratap
beton, genteng, asbes,
seng, dan kayu/sirap.

99,03%
rumah tangga

tinggal di rumah
berlantai bukan tanah.

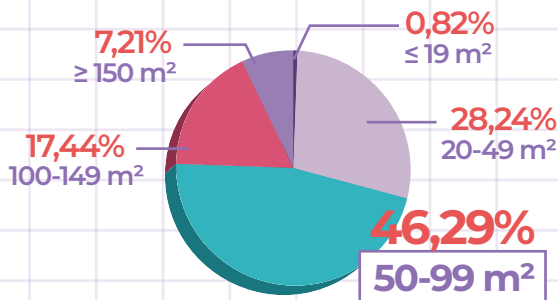


99,46%
rumah tangga

tinggal di rumah dengan
dinding terluas adalah
tembok dan kayu.

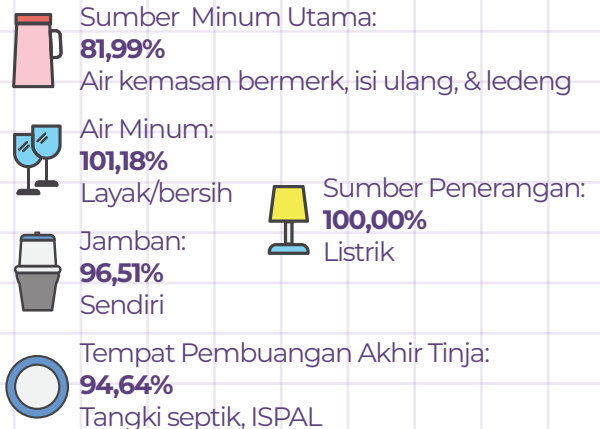
PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Persentase Rumah Tangga menurut
Luas Lantai Tempat Tinggal
di Kota Dumai Tahun 2020



58,56% rumah tangga
tinggal di rumah milik sendiri, sementara
sisanya di rumah kontrak/sewa,
bebas sewa, dan rumah dinas/lainnya.

Persentase Rumah Tangga menurut
Beberapa Fasilitas Perumahan
di Kota Dumai Tahun 2020





BAB VI

Perumahan & Lingkungan

Rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan dasar dan juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah mempunyai pengaruh terhadap pembinaan watak dalam kepribadian serta merupakan faktor penting terhadap produktivitas kerja dan kreativitas kerja seseorang. Selain itu, rumah juga mempunyai fungsi strategis sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat melalui pemenuhan kebutuhan papan, maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberi ketentraman hidup bagi manusia. Dalam fungsinya sebagai pengamanan diri, bukan berarti menutup diri, melainkan tetap harus membuka diri untuk menyatu dengan lingkungannya. Kualitas lingkungan rumah tinggal mempengaruhi status kesehatan penghuninya. Kualitas rumah tinggal yang baik dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan (Kepmen Nomor 9 Tahun 1999) diartikan sebagai suatu kondisi rumah yang memenuhi standar minimal dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi, dan kualitas teknis.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur,

terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Perumahan didefinisikan sebagai kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Rumah, selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin besar peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik.

Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material, seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

Kualitas Rumah Tinggal

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, asbes, seng, atau kayu/sirap, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Berdasarkan data Susenas 2020, secara umum, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantai bukan tanah menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2019, rumah yang berlantai bukan tanah sebesar 99,78 persen, menurun menjadi 99,03 persen pada tahun 2020. Meski menunjukkan penurunan, besaran persentase rumah berlantai

bukan tanah masih di atas 99 persen. Artinya, kurang dari satu persen saja rumah tangga yang tinggal di rumah berlantaikan tanah.

Sementara itu, jika dilihat menurut jenis atap terluas, kualitas rumah yang beratap layak telah mencapai 99,67 persen pada tahun 2020. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 99,58. Sebagaimana dari sisi lantai terluas, rumah layak pada dua tahun terakhir dari sisi atap terluas juga mencapai angka di atas 99 persen.

Adapun kualitas rumah dengan dinding terluas dari tembok dan kayu pada tahun 2020 mencapai 99,46 persen. Kualitas perumahan dari sisi dinding terluas semakin membaik dibandingkan tahun 2019 yang persentasenya mencapai 99,41 persen. Ketiga indikator kualitas perumahan menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 99 persen rumah tangga yang tinggal di rumah yang layak.

Tabel 6.1 Persentase (%) Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Indikator Kualitas Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Lantai terluas: bukan tanah	99,78	99,03
Atap terluas: beton, genteng, asbes, seng, dan kayu/sirap	99,58	99,67
Dinding terluas: tembok dan kayu	99,41	99,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020 (diolah)

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai perorang minimal 10 m². Sementara itu, menurut Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah, kebutuhan ruang perorang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah.

Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak, serta ruang gerak lainnya.

Dari hasil kajian, kebutuhan ruang perorang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat jika penguasaan luas lantai perkapitanya minimal 8 m² (BPS, 2001).

Tabel 6.2 Persentase (%) Rumah Tangga menurut Luas Lantai Rumah di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Luas Lantai (m ²)	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
≤ 19	1,11	0,82
20-49	25,00	28,24
50-99	46,79	46,29
100-149	17,06	17,44
≥ 150	10,03	7,21
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

Pada tahun 2020, luas tempat tinggal cenderung didominasi pada kelompok luas 50-99 m², yaitu sebanyak 46,29 persen rumah tangga di Kota Dumai, menurun 0,50 persen dari tahun 2019. Luas lantai yang banyak ditinggali berikutnya adalah pada kelompok luas 20-49 m² sebesar 28,24 persen, kemudian kelompok luas 100-149 m², diikuti kelompok luas 150 m² ke atas, dan yang terakhir kelompok luas 19 m² ke bawah yang persentasenya tidak mencapai satu persen rumah tangga di Kota Dumai pada tahun 2020. Distribusi rumah tangga menurut luas lantai menunjukkan pola yang cukup baik dan umum, di mana semakin besar atau semakin kecil luas lantai, maka semakin sedikit rumah tangga yang meninggali rumah dengan karakteristik tersebut.

Fasilitas Rumah Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal ditentukan oleh kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal. Yang termasuk dalam kelengkapan fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup, terutama untuk keperluan minum dan masak, merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Tabel 6.3 Persentase (%) Rumah Tangga menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Fasilitas Perumahan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Sumber minum utama: air kemasan bermerk, air isi ulang, dan leding	80,05	81,99
Air minum: bersih* / layak**	98,68	101,18
Penggunaan fasilitas tempat BAB: sendiri	96,47	96,51
Tempat pembuangan akhir tinja: tangki septik, IPAL	94,93	94,64
Sumber penerangan utama: listrik	99,13	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

Catatan:

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m]

***) Terdiri dari leding, air hujan, dan [(sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung) dengan jarak ke Tempat Penampungan Limbah/Kotoran/Tinja Terdekat ≥ 10 m]

Pada tahun 2019 dan 2020, rumah tangga di Kota Dumai yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air ledeng sebagai sumber air minum mencapai 80 persen, bahkan meningkat di tahun 2020. Besarnya persentase rumah tangga yang air minumannya dikategorikan bersih atau layak pada tahun 2020 telah mencapai 101,18 persen. Angka ini juga meningkat di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

Penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Jika ditinjau dari sudut kesehatan lingkungan, pembuangan kotoran manusia yang tidak saniter akan mencemari lingkungan, terutama tanah dan sumber air, selain juga akan menyebabkan berbagai macam penyakit seperti tipus, disentri, dan kolera. Untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan, pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik atau IPAL.

Teknologi pembuangan kotoran manusia untuk daerah perdesaan berbeda dengan teknologi jamban di daerah perkotaan. Selama tahun 2019-2020, persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri meningkat dari 96,47 persen menjadi 96,51 persen. Kebutuhan akan jamban telah menjadi semakin dapat dipenuhi oleh rumah tangga di Kota Dumai. Di samping itu, tempat pembuangan akhir tinja juga memengaruhi faktor kesehatan masyarakat. Adanya tanki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga untuk memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2019 dan 2020, rumah tangga yang menggunakan tangki septik atau IPAL sudah di atas 94 persen, meskipun terjadi sedikit penurunan sebesar 0,29 persen di tahun 2020.

Fasilitas perumahan lainnya yang juga penting adalah penerangan. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non-PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2020, sebanyak 100 persen rumah tangga di Kota Dumai telah menikmati fasilitas penerangan listrik, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 99,13 persen.

Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak/sewa, bebas sewa, dan rumah dinas. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil Susenas 2020, sebanyak 58,56 persen rumah tangga menempati rumah milik sendiri, meningkat secara persentase dari tahun sebelumnya. Adapun sisanya 41,44 persen menempati tempat tinggal bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari 28,52 persen kontrak/sewa (meningkat), 9,07 persen bebas sewa (menurun), dan 3,85 persen rumah dinas (meningkat).

Tabel 6.4 Persentase (%) Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati di Kota Dumai Tahun 2019-2020

Status Kepemilikan	Tahun	
	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Milik Sendiri	56,52	58,56
Kontrak/Sewa	28,32	28,52
Bebas Sewa	13,71	9,07
Dinas	1,45	3,85
Jumlah	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 2019-2020

ISTILAH TEKNIS

Laju Pertumbuhan Penduduk

Rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk di suatu daerah selama periode waktu tertentu.

Rasio Jenis Kelamin

Perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu.

Angka Beban Ketergantungan

Perbandingan antara [jumlah penduduk umur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas] dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun, dikalikan 100.

Angka Kesakitan

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Angka Melek Huruf

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis sebuah kalimat sederhana.

Angka Partisipasi Sekolah

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Putus Sekolah

Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.

Angka Partisipasi Murni

Proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja (termasuk sementara tidak bekerja) dan menganggur.

Bekerja

Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Lapangan Usaha

Bidang kegiatan usaha yang dibedakan berdasarkan pendekatan kegiatan yang menekankan pada proses dari kegiatan ekonomi dalam menciptakan barang/jasa, dan pendekatan fungsi yang lebih melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang/jasa.

Masih Bersekolah

Terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A/B/C).

Penduduk Usia Kerja

Penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Pengangguran

Penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

Pekerja Bebas

Seseorang yang bekerja pada orang lain/ majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam satu bulan terakhir).

Pekerja Keluarga

Seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/ gaji, baik berupa uang maupun barang.

Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.

Tamat Sekolah

Telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/ tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah.

Pengeluaran

Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, naman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Air Minum Layak

Air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur dan mata air tidak terlindung.

Status Pekerjaan

Jenis kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/ kegiatan.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KOTA DUMAI
Jalan Tuanku Tambusai - Dumai
Telepon (0765) 4300005
Homepage: www.dumaikota.bps.go.id
E-mail: bps1473@bps.go.id